

**PELAKSANAAN FUNGSI DPRD DALAM PENGAWASAN
ANGGARAN TERHADAP GEMPA BUMI DI KABUPATEN
PASAMAN BARAT TAHUN 2022**

EXECUTIVE SUMMARY

Diajukan Sebagai Syarat

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum



DISUSUN OLEH:

NAYANG KUMALA SARI

20100121110058

BAGIAN HUKUM TATA NEGARA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BUNG HATTA

PADANG

2024

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA

PERSETUJUAN EXECUTIVE SUMMARY
No. Reg: 24/Skripsi/HTN/FH/II-2024

Nama : **Nayang Kumala Sari**
NPM : **2010012111058**
Bagian : **Hukum Tata Negara**
Judul Skripsi : **Pelaksanaan Fungsi DPRD Dalam Pengawasan
Anggaran Terhadap Gempa Bumi di
Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2022**

Telah dikonsultasikan dan disetujui oleh Pembimbing untuk di *upload* ke *website*.

Helmi Chandra SY, S.H., M.H


(Pembimbing) ()

Mengetahui:

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta**

**Ketua Bagian
Hukum Tata Negara**




(**Dr. Sanidjar Pebrihariati, R. S.H., M.H**)


(**Dr. Desmal Fajri, S.Ag., M.H**)

PELAKSANAAN FUNGSI DPRD DALAM PENGAWASAN ANGGARAN TERHADAP GEMPA BUMI DI KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2022

Nayang Kumala Sari¹, Helmi Chandra SY, S.H., M.H.¹

¹Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

Email: nayangkumalasari240@gmail.com

ABSTRAC

The West Pasaman Regency DPRD acts as a working partner for the regional government. Its functions are legislation, budget and supervision, the DPRD's supervisory function is to supervise the budget for the earthquake in West Pasaman Regency in 2022 and see the extent to which budget supervision is carried out for victims of natural disasters in 2022. The problem formulation in the research is 1). What are the DPRD's responsibilities in monitoring the budget for the earthquake in West Pasaman Regency in 2022? 2). What are the DPRD's obstacles in monitoring the budget for the earthquake in West Pasaman Regency in 2022? 3). What are the DPRD's efforts in monitoring the budget for the earthquake in West Pasaman Regency in 2022? The research method uses sociological juridical, primary data sources and secondary data, interview and document data collection techniques, data analysis using qualitative. The results of this research are 1). Form of responsibility of the DPRD in monitoring the 2022 earthquake budget, by evaluating the budget, holding meetings with BPBD, monitoring programs, monitoring transparency and accountability 2). The DPRD's main obstacles in budget supervision are distance from location, lack of communication, inappropriate budget, inadequate supervisory function, lack of member expertise, limited information 3). The efforts made by the DPRD include picking up victims with aid cars, re-verifying them, re-proposing the budget, appealing to DPRD members, providing understanding to DPRD members, holding meetings with other institutions..

Keyword: Supervision, DPRD, Earthquake

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah satu negara yang rawan terhadap bencana alam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, bencana alam merupakan suatu rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan masyarakat,

Dalam penegakan suatu pengawasan bencana alam dalam penyelenggaraan pemerintah, maka di bentuklah DPRD(Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) yang mana akan menjadi salah satu penghubung untuk menjalankan

tugas serta mengurus kepentingan masyarakat itu sendiri¹.

Pasal yang mengatur fungsi DPRD Kabupaten/kota yang terdapat pada Pasal 365 Ayat(1) dan Ayat(2) yang dimana isi ayat 1 yaitu legislasi, anggaran dan pengawasan, sedangkan ayat 2, bahwa ketiga fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 di jalankan dalam kerangka representasi di kabupaten/kota.

Pelaksanaan fungsi yang dilakukan oleh DPRD dalam pengawasan

¹ Irawan, Manajemen Bencana Pada peserta Didik Untuk Mengurangi Resiko Bencana Gempa Bumi, *Pandipa*, Vol 6. No 22

anggaran terhadap gempa bumi di Kabupaten Pasaman Barat pada tahun 2022 yang dimana pada tahun tersebut telah terjadi kerusakan pada rumah warga serta jatuhnya korban yang diakibatkan oleh gempa bumi.²

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis melakukan penelitian dengan judul:

“PELAKSANAAN FUNGSI DPRD DALAM PENGAWASAN ANGGARAN TERHADAP GEMPA BUMI DI KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2022”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah bentuk tanggung jawab DPRD dalam pengawasan anggaran gempa bumi di Kabupaten Pasaman Barat tahun 2022?
2. Apa saja kendala-kendala DPRD Dalam pengawasan anggaran gempa bumi di Kabupaten Pasaman Barat tahun 2022?
3. Bagaimana upaya DPRD dalam pengawasan anggaran terhadap gempa bumi di Kabupaten Pasaman Barat di tahun 2022?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisa bentuk tanggung jawab DPRD dalam pengawasan anggaran gempa bumi di Kabupaten Pasaman Barat tahun 2022.
2. Untuk menganalisa kendala-kendala DPRD dalam pengawasan anggaran terhadap gempa bumi di Kabupaten Pasaman Barat tahun 2022.
3. Untuk menganalisa upaya DPRD dalam pengawasan anggaran gempa bumi di Kabupaten Pasaman Barat tahun 2022.

² Indartini Mirtarti et al, 2019, Peran dan Fungsi DPRD Dalam Perencanaan Dan Penganggaran Daerah, ivory, solo, hlm 16

II. METODE

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan Yuridis Sosiologis, Sumber data yang digunakan Data Primer dan Data Sekunder, Teknik Pengumpulan data Studi Dokumen dan Wawancara, Analisi Data yang digunakan Kualitatif³

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk tanggung jawab DPRD dalam Pengawasan Anggaran Terhadap Gempa Bumi di Kabupaten Pasaman Tahun 2022

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Syafridal selaku Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Pasaman Barat.

1. Evaluasi Anggaran, yang dimana DPRD akan melakukan evaluasi menyeluruh untuk mengetahui rincian
2. Melakukan rapat dengan berbagai pihak, yang dimana DPRD dapat melakukan rapat dengan BPBD serta pihak lain yang bersangkutan.
3. Melakukan suatu pengawasa program mengawasi program seperti program bantuan makanan, pakaian, obat-obatan ataupun tempat tinggal sementara
4. Pengawasan terhadap Transparansi serta Akuntabilitas dalam pengelolaan dana agar dapat dimanfaatkan⁴

³ Bambang Sunggono, 2019, Metode Penelitian Hukum, Rajawali Press, Depok, hlm 84

⁴ Wawancara dengan Bapak Syafridal Komisi II DPRD Kabupaten Pasaman Barat

B. Kendala-kendala DPRD dalam Pengawasan Anggaran terhadap Gempa Bumi di Kabupaten Psaman Barat tahun 2022

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Syfridal selaku Komisi II DPRD Kabupaten Pasaman Barat.

1. Jarak lokasi yang cukup karena dampak dari gempa bumi tersebut yang di mana jembatan tersebut hampir cukup sulit di jangkau
2. Kurangnya komunikasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat yang mana terjadi kesalahpahaman mengenai data
3. Anggaran yang telah disetujui dan anggaran yang telah diterima tidak sesuai dengan yang diharapkan.
4. Tidak maksimalnya fungsi pengawasan anggaran karena anggaran yang telah di tetapkan belum cair sepenuhnya.
5. Kurangnya keahlian DPRD dalam bidang pengawasan, sehingga pengawasan anggaran tersebut belum maksimal,
6. Adanya keterbatasan informasi serta koordinasi antara lembaga-lembagayang terkait.

C. Upaya DPRD dalam Pengawasan Anggaran Terhadap Gempa Bumi di Kabupaten Pasaman Barat tahun2022

1. Untuk jarak lokasi yang cukup jauh, DPRD sebisa mungkin membantu masyarakat dengan cara membawa masyarakat satu persatu dengan mobil bantuan.
2. Kurangnya komunikasi membuat DPRD ikut turun tangan memantau kembali verifikasi ulang data tersebut.

3. Upaya mengenai anggaran yang belum sepenuhnya cair, para Anggota DPRD mengusulkan kembali.
4. Ketua DPRD dan Wakil DPRD berharap dan menghimbau semua anggota-anggota DPRD benar-benar mengawasi anggaran untuk bantuan korban gempa bumi.
5. DPRD berupaya agar semua anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasaman Barat lebih paham mengenai tugas serta fungsinya.
6. Upaya yang dilakukan mengenai keterbatasan informasi, DPRD melakukan rapat-rapat dengan lembaga lainya⁵

IV. PENUTUP

A. SIMPULAN

1. Bentuk tanggung jawab DPRD
 - a. Melakukan Evaluasi anggaran
 - b. Melakukan rapat dengan pihak-pihak BPBD
 - c. Melakukan suatu pengawasan program
 - d. Melakukan pengawasan terhadap transparansi serta akuntabilitas
2. Kendala-kendala DPRD
 - a. Jarak rumah warga yang cukup jauh
 - b. Kurangnya komunikasi terhadap pemerintah daerah dengan pemerintah.
 - c. Anggaran yang telah disetujui tidak sesuai dengan anggaran yang telah diterima
 - d. Tidak maksimalnya fungsi terhadap pengawasan
 - e. Kurangnya keahlian anggota DPRD
 - f. Adanya keterbatasan informasi

⁵ Wawancara dengan Bapak Syafridal Komisi II DPRD Kabupaten Pasaman Barat

3. Upaya DPRD
 - a. Untuk lokasi yang cukup jauh, DPRD menjemput masyarakat dengan mobil bantuan
 - b. Ikut memantau kembali data rumah rusak berat, rumah rusak sedang, dan rumah rusak ringan.
 - c. Mengusulkan kembali anggaran dana untuk korban bencana gempa bumi
 - d. Menghimbau anggota-anggota DPRD untuk benar-benar mengawasi anggaran untuk bantuan korban tersebut
 - e. Melakukan pemahaman untuk anggota DPRD
 - f. Melakukan rapat-rapat dengan lembaga lain

B. SARAN

1. Anggota DPRD Kabupaten Pasaman Barat agar mampu meningkatkan serta memastikan fungsinya berjalan dengan lancar.
2. Supaya anggota DPRD ikut turun kelapangan apalagi mengenai anggaran yang telah dikeluarkan untuk para korban bencana gempa bumi.
3. DPRD yang telah ditunjuk benar-benar paham dengan tugasnya, sehingga tidak terjadi kesalahan data yang mana harus menverifikasi ulang data mengenai rumah rusak berat, rumah rusak sedang dan rumah rusak ringan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

Bambang Sunggono, 2019, *Metode Penelitian hukum*, Rajawali Press, Depok

Mirtati Indratini, 2019, *Peran dan Fungsi DPRD Dalam Perencanaan dan Penganggaran Daerah*, Ivorie, Solo

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, DPRD

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

C. Sumber lainnya

Irawan, et al, 2022, Manajemen Mitigasi Bencana Pada Peserta Didik Untuk Mengurangi Risiko Bencana Gempa Bumi, Pandipa, Volume 6, Nomor 2

Wawancara dengan Bapak Syafridal Komisi II DPRD Kabupaten Pasaman Barat

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih kepada Bapak Helmi Chandara SY, S.H., M.H., Dosen Pembimbing penulis yang sudah memberikan waktu dan arahannya dalam menyelesaikan skripsi dengan baik, juga kepada:

1. Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, Ibu Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H., M.H.
2. Ketua Bagian Hukum Tata Negara, Bapak Dr. Desmal Fajri, S.Ag., M.H
3. Penasehat Akademik, Ibu Dr. Elyana Novira, S.H., M.H
4. Kepada para pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu